Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam
Volume 14. No. 2. Juli-Desember 2024
Office: Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
Website OJS: https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/liwauldakwah
E-ISSN: 2809-1523 || P-ISSN: 2089-2896
DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v14i2.4834

DISKURSUS WACANA ISLAM POLITIK DI INDONESIA ISLAMISME, NASIONALIS, DAN SOSIAL-EKONOMI

Mukhtar
STAI Al Washliyah Banda Aceh
mukhtar@staialwashliyahbandaaceh.ac.id

Hafniati
Dosen Institut Agama Islam (IAI) Al Ghurabaa Jakarta
hafzul74@gmail.com

Zulkifli
Universitas Samudra (UNSAM) Langsa
zulkifli82@unsam.ac.id

Article:
Received: Agustus, 2024
Accepted: November, 2024
Published: Desember, 2024

© 2024 The Author(s).
This is an open-access article under the CC BY-SA license

Correspondence Address:
mukhtar@staialwashliyahbandaaceh.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengkaji wacana Islam politik di Indonesia: Islamisme, nasionalis, dan sosial-ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa wacana Islam politik mengemuka tidak hanya di parlemen tetapi juga terjadi di luar lingkup kekuasaan. Substansi nilai-nilai Islam dalam konteks ke-Indonesiaan menjadi jalan keluar terhadap polemik kebangsaan. Ditinjau dari konsepsi politik Indonesia merupakan negara sekuler-nasionalis-islamis dengan basis kultural yang kuat. Pluralisme budaya tidak menjadikan polemik politik susah untuk dipadamkan. Heterogenisitas mengemuka dalam konteks budaya, tetapi sisi kebangsaan lebih utama dalam konteks bernegara. Penelitian ini membahas wacana Islam politik dengan metode analisis deskriptif berdasarkan kajian literatur (kepustakaan). Metode analisis deskriptif berusaha memahami simbol data dan narasi teks diungkapkan. Penelitian ini juga menggunakan metode *histories factual* dengan menelaah pemikiran tokoh yang tertuang dalam karya-karya yang ada. Berdasarkan sumber data dan jenis penelitian, serta metode pengumpulan data, kajian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, juga menggunakan pendekatan sejarah, sosial, dan politik.

Kata kunci : Islam, Politik, Indonesia, Islamisme, Nasionalis, dan Sosial-Ekonomi.

Abstract: This research examines the discourse of political Islam in Indonesia: Islamism, nationalism, and socioeconomics. This research shows that the discourse of political Islam emerges not only in parliament but also outside the sphere of power. The substance of Islamic values in the context of Indonesian's is a way out of the national polemic. In terms of political conception, Indonesia is a secular-nationalist-Islamist country with a strong cultural base. Cultural pluralism does not make political polemics difficult to extinguish. Heterogenicity is prominent in the cultural context, but the national side is more important in the context of the state. This research discusses the discourse of political Islam with a descriptive analysis method based on a literature review. The descriptive analysis method seeks to understand the data symbols and text narratives expressed. This research also uses the factual historical method by examining the thoughts of figures contained in existing works. Based on data sources and types of research, as well as data collection methods, this study includes library research. The method of analysis of this research uses a philosophical approach, also using historical, social, and political approaches.

Keywords: Islam, Politics, Indonesia, Islamism, Nationalism, and Socio-Economics.

Pendahuluan

Diskursus Islam politik[1] di Indonesia, menurut Bahtiar Effendi terbagi pada tiga periode. *Pertama*, periode pra-kemerdekaan. *Kedua*, periode pascarevolusi: perjuangan demi Islam sebagai dasar ideologi negara. *Ketiga*, Periode orde baru: 'penjinakan" idealisme dan aktivisme politik Islam.[2] Menurut Azyumardi Azra, sekitar abad ke tiga belas sudah terjalin kontak Islam dan politik di Indonesia.[3]

Sebagian besar karya penting tentang hubungan antara Islam dan politik atau Islam dan negara memakai pendekatan tipologis untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan sikap kaum muslim Indonesia dalam menghadapi isu-isu religius-politik. Hal ini disebabkan terutama oleh fakta bahwa Islam Indonesia adalah campuran bermacam ragam kelompok dan tidak bisa digambarkan dalam satu generalisasi. Studi terkenal Clifford Geertz menemukan tiga varian khas Muslim Jawa. Trikotomi ini, dikenal sebagai santri,[4] priyayi,[5]

[1] Fahmy Farid Purnama, "Khawarijisme: Pergulatan Politik Sektarian Dalam Bingkai Wacana Agama" Al-A'raf: *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. 14, No 2, (Juli-Desember 2016): 214-232, http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-araf/article/v iew/156.

[2] Bahtiar Effendi, Islam dan Negara: *Transformasi Pemikiran dan Praktik politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 61-124.

[3] Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepu lauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Melacak Akar akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung Mizan 1994), h. 25.

[4] Santri adalah sekelompok orang terdidik yang berasal dari kalangan pesantren, kelompok terpelajar yang hadir dari produk pendidikan Islam. Arah politik santri lebih cenderung pada partai yang berasaskan Islam seperti Masyumi dan Nadhlatul Ulama.

[5] Priyayi adalah kelompok yang merujuk pada elit birokrat dan aristrokrat kraton jawa. Dalam politik, seperti halnya abangan, sebagian besar priyayi mendukung partai-partai secular nasionalis.

DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v14i2.4834

dan abangan,[6] bukan hanya mencerminkan struktur religius-kultural, melainkan juga menjelaskan komposisi politik dan ekonomi.[7]

Deliar Noer, dalam karyanya *The Modernist Muslim Movement in Indonesia*, memberikan klasifikasi terkait tipologi religius-politik yang lebih luas, Noer membagi sikap-sikap religius-politik Muslim Indonesia menjadi "modernis" dan "tradisionalis". Modernis adalah Muslim yang berpandangan bahwa modernitas bisa diterima sebagai instrumen baru bagi kemajuan Islam. Tradisionalis adalah Muslim yang percaya bahwa nilai-nilai tradisional masih cocok dengan kehidupan kontemporer. Baik modernis maupun tradisionalis percaya akan nilai-nilai utama dalam doktrin politik Islam, misalnya, negara harus punya dasar religius, penerapan syariat Islam, dan komitmen terhadap intisari prinsip-prinsip Islam. Jadi, dalam politik, baik modernis maupun tradisionalis mendirikan satu partai Islam tunggal Masyumi. Hanya saja, karena perbedaan sudut pandang dan kepentingan politik pragmatis, partai itu pecah di tahun 1952. Kaum tradisionalis mendirikan partai mereka sendiri, Partai Nahdlatul Ulama.[8]

Pembagian modernis-tradisionalis didasarkan terutama pada kategorisasi santri,[9] jika kita memakai istilah Geertz. Pembagian ini tidak melingkupi kaum Muslim Indonesia yang lebih luas. Secara nasional, tanpa memperhatikan latar belakang agama mereka, Noer mengklasifikasikan sikap politik Muslim Indonesia ke dalam apa yang ia sebut "nasionalis netral agama" dan "nasionalis Muslim". Dalam menghadapi isu-isu seperti Nasionalisme, negara, dan pemerintah, kaum nasionalis netral agama menolak dasar Islam yang didukung oleh kaum nasionalis Muslim. Klasifikasi Noer diterima luas.[10] Endang Saifuddin Anshary, misalnya, memakai tipologi ini dan memodifikasinya ke dalam "nasionalis Islami"[11] dan "nasionalis sekular".[12]

Menarik dicermati pola-pola pemikiran politik Islam dalam kaitan dengan perseteruan Islam dan negara pasca kemerdekaan, di mana sebagian kalangan memandangnya sebagai sikap moderat umat Islam Indonesia di masa itu. Oleh karena demikian, banyak kalangan melihat sebagai "kesuksesan" para tokoh Islam melahirkan falsafah dasar negara yaitu Pancasila melalui deklarasi Piagam Jakarta tahun 1945. Meski

---

[6] Abangan merupakan sekelompok Muslim yang sebagian besar adalah petani dan tinggal diwilayah pedesaan yang berprofesi sebagai petani. Kaum abangan pilihan politiknya lebih cenderung pada partai politik *seculer non relgius* seperti PNI, PSI, dan PKI.

[7] Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia*, (Jakarta: Freedom Institute, 2011), h. 4. Lihat juga, Mahli Zainudin Tago, "Agama Dan Integrasi Sosial Dalam Pemikiran Clifford Geertz," *KALAM*, Vol. 7, No. 1 (2017): 79-94, http://ejournal.radenintan.ac.id/index .php/KALAM/article/view/377.

[8] Wasisto Raharjo Jati, "Ulama Dan Pesantren Dalam Dinamika Politik Dan Kultur Nahdlatul Ulama," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* (September 17, 2013), http://ejournal.ui n-malang.ac.id/index.php/ululalbab/article/view/2377.

[9] Ali Maksum, "Model Pendidikan Toleransi Di Pesantren Modern Dan Salaf," *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, Vol. 3, No. 1 (February 7, 2016): 81, http://jurnalpai.uinsby.ac.id/index.ph p/jurnalpai/article/view/40.

[10] Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia*, (Jakarta: Freedom Institute, 2011), h. 6.

[11] Lebih lanjut baca, Dadan Muttaqien, "Kompromi Politik Antara Nasional Islami Dengan Nasionalis Sekuler Sebuah Solusi Dalam Pemilihan Presiden di Republik Indonesia," *Al-Mawarid*, Vol. 8 (2002). : 40-51, http://jurnal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/ view/6127.

[12] Anjar Nugroho, "Wacana Islam Dan Negara Era Pra-Kemerdekaan: Pergulatan Ideologis Kelompok Islam Dan Nasionalis Sekuler," Afkaruna, Vol. 9, No. 2 (2013): 129–147, http://journal.umy.ac.id/index.php/afkaruna/article/view/37.

DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v14i2.4834

demikian, harus diakui bahwa tidak sedikit juga yang menilai hal tersebut sebagai "kegagalan" ulama atau tokoh pergerakan Islam dalam perumusan final Piagam Jakarta, terutama terkait dengan penghapusan sembilan kata dalam sila pertama Pancasila yaitu "ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", yang kemudian berubah menjadi empat kata yaitu sila "Ketuhanan Yang Maha Esa". Inilah antara lain hasil dari berbagai dialog dan diskusi panjang, penuh kemelut dan melelahkan umat Islam Indonesia pasca kemerdekaan dalam menyikapi tema "relasi Islam dan negara".[13]

Diskursus hubungan antara Islam dan negara, terkait dengan hubungan Islam dan Pancasila di Indonesia, jika dikaitkan dengan dasar negara (*grundnorm*) telah menjadi perdebatan panjang. Kelompok ideologi, baik yang berasal dari kaum nasionalis maupun Islamis telah menyuguhkan sudut pandang konfrontatif antara keduanya. Kaum nasionalis memandang menjadikan Islam sebagai dasar negara memicu munculnya disintegrasi bangsa, sementara kaum Islamis melihat bahwa Islam telah membawa ajaran yang lengkap, dan tidak perlu lagi adanya atribut yang lain.[14] Menurut Bahtiar Effendi, perdebatan tentang dasar ideologi negara menegemuka menjadi tiga aliran yang menonjol, yakni Islam, Pancasila, dan Sosial ekonomi. Mengingat perdebatan-perdebatan tentang dasar ideologi negara yang berlangsung sebelumnya, pertentangan yang paling sengit berlangsung antara para pendukung ideologi Islam dan Pancasila.[15] Sebagaimana Soekarno menyatakan,[16] tiga varian ini di antaranya islamisme, nasionalisme, dan sosial-ekonomi akan menjadi jalan menuju persatuan bangsa, untuk meraih kemerdekaan.

1. Ideologi Islamis/Tradisionalis

Segmentasi Islam di Indonesia mempunyai beberapa dimensi. *Pertama*, dimensi budaya, yakni kelompok-kelompok Islam di Indonesia yang mempunyai latar belakang budaya keagaamaan yang berbeda, terkait dengan perbedaan latar belakang sosial budaya. Pluralisme masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, muncul dari perbedaan latar belakang etnik, bahasa, dan adat istiadat, dan juga sangat dipengaruhi oleh perbedaan geografis, serta sifat-sifat dasar kekuasaan atas budaya mereka.[17] Sebagaimana A. Hasjmy menyimpulkan bahwa, kebudayaan Aceh sebagai bagian

[13] Hamsah Hasan, "Hubungan Islam dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia," *Al-Ahkam*, Vol. 1, No. 25 (April 25, 2015): 1 9, http://jou rnal.waliso ngo.ac.id/index.php/ahkam/article/vi ew/192.

[14] Fokky Fuad, "Islam dan Ideologi Pancasila: Sebuah Dialektika", *Lex* Jurnalica, Vol. 9, No. 3, (Desember 2013): 164-170, https://fh.uai.ac.id/wp-content/uploads/2016/02/Is lam-dan-Ideologi-Pancasi la-Sebuah-Dialektika-.pdf2012.

[15] Bahtiar Effendi, Islam dan Negara: *Transformasi Pemikiran dan Praktik politik Islam di Indonesia*..., h. 107. Lihat juga, Ali Munhanif, "Al-Shawkah Al-Siyāsīyah Li Al-Afkār Al-Dīnīyah: Al-Ḥarakah Al-Tajdīdīyah Al-Islāmīyah Wa Al-Ṭarīq Ilá Nuqṭat Iltiqā' Al-Islām Wa Al-Dawlah," *Studia Islamika*, Vol. 22, No. 1, (2015): 97-132, http://journal.uin jkt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view /1389.

[16] Soekarno, *Di Bawah Bendera* Revolusi, (Jakarta: Banana Books, 2016), h. ii.

[17] Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde* Baru, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 43.

DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v14i2.4834

dari wilayah Indonesia, tidak dapat memisahkan dirinya dari kebudayaan Islam itu sendiri, keberadaan keduanya saling mempengaruhi.[18] "*Adat ngon hukom Lage zat ngon sifet*".[19]

Kedua, dimensi yang besifat psikologis, sentimen kultural ini, menumbuhkan suatu sikap psikologis tertentu di kalangan kelompok-kelompok umat. Suatu paham keagamaan yang berasal dari kelompok-kelompok lain. Ada suatu perdebatan yang konstan, dan dalam interaksi ofensif, teori-teori baru dikedepankan, untuk medukung paradigma kelompok mereka masing-masing. Maka setiap gagasan keagamaan baru mempunyai dimensi fungsional. Ia merupakan alat untuk membenarkan solidaritas kultural para pembentuknya.[20]

Ketiga, dimensi yang bersifat politik, ini kelanjutan dari dua faktor sebelumnya. Setiap kelompok terlibat dari dalam persaingan politik untuk menunjukkan identitas budaya dan untuk menyebarkan setiap pandangan keagamaan mereka masing-masing. Dalam sejarah politik Islam Indonesia pada masa Orde Lama terdapat persaingan antara partai-partai Islam dalam mempromosikan "ideologi" mereka masing-masing agar mendapatkan dukungan politik dari umat Islam demi cita-cita sektarian mereka sendiri. Peran yang dimainkan Masyumi dalam politik Indonsesia sebelum pemilihan umum tahun 1955 dan pemilihan-pemilihan lokal tahun 1957 banyak ditentukan keberhasilan para pemimpinnya. Mereka mengartikulasikan simbol-simbol Islam dan kepentingan umat Islam ke dalam isu-isu politik sehingga memikat umat Islam.[21]

Dinamika politik Indonesia pasca kolonial, jika diamati tampak bahwa, para politisi muslim mengalami kesulitan yang cukup berarti dalam mensintesakan landasan teologis atau filosofis mereka dengan realitas sosio-kultural dan politik yang ada. Hal ini, terkusus pada upaya mereka untuk merumuskan hubungan antara Islam dan negara yang dapat diterima secara nasional.[22] Kedatangan Islam menurut Jarji Zaidan, merupakan suatu revolusi besar dalam bidang agama, politik, ekonomi, dan sosial budaya.[23] Sementara A. Hasjmy menjelaskan bahwa, membahas kebudayaan Islam, berarti membahas alam pikiran Islam, alam perasaan Islam, dan alam cita Islam, yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi dan sosial.[24]

Menjadi keharusan mutlak, bahwa tiap-tiap revolusi pasti akan meninggalkan jejak dalam kehidupan dan penghidupan umat yang dilanda revolusi. Terdapat tiga perubahan mendasar yang berlaku atas kedatangan Islam dalam kehidupan seni-budaya Arab Jahiliyah. *Pertama*, Islam menghapus sama sekali kebudayaan mereka. *Kedua*, Islam

---

[18] Sri Waryanti, "Makna Rencong Bagi Ureueng Aceh," *Patanjala : Jurnal Pene litian Sejarah dan Budaya*, Vol. 5, No. 3 (August 4, 2017): 403, http://ejurnalpatanjala. kemd ikbud.go.id/patanjala/index.php/patanjala/article/view/86.

[19] Arief Muammar, Amroeni Drajat, and Katimin Katimin, "The Relevance of Ali Hasjmy's Thoughts on Islamic Country of Islamic Sharia Implementation in Aceh," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, Vol. 2, No. 2 (May 14, 2019): 228–240, http://bircu-journal.com/index.php/ birci/a rticle/view/255.

[20] Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde* Baru…, h. 44.

[21] Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*..., h. 43-46.

[22] Bahtiar Effendi, Islam dan Negara: *Transformasi Pemikiran dan Praktik politik Islam di Indonesia*..., h. 128.

[23] Abubakar Madani, "Dakwah dan Perubahan Sosial: Studi Terhadap Peran Manusia sebagai Khalifah di Muka Bumi", *Lentera*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2017): 1-15, https://journal.iai n-samar inda.ac.id/index.php/lentera/article/view/85 1/536.

[24] A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 7.

DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v14i2.4834

memperbaiki dan menyempurnakan sebahagian yang lainnya. *Ketiga*, Islam menciptkan kebudayaan baru yang belum pernah ada. Adapun kebudayaan Jahiliyah yang dibatalkan Islam, antara lain "kahanah" (tenun) dengan segala macamnya, patung berhala yang disembah, bermacam-macam upacara ibadat yang salah, aneka rupa akidah yang sesat. Adapun kebudayaan baru yang diciptakan banyak sekali, di antaranya bangunan-bangunan keagamaan, seperti masjid, sistem musyawarah dalam pemerintahan, ilmu syariat, ilmu berdebad, ilmu kedokteran, thib, ilmu alam, ilmu mistik, dan yang lainnya.[25]

Hubungan antara Islam dan negara di Indonesia pada sebagian besar babakan sejarahnya merupakan cerita antagonisme dan kecurigaan satu sama lain. Tetapi atas pertimbangan bahwa Indonesia adalah negara yang secara sosial keagamaan bersifat majemuk, maka demi kesatuan dan persatuan nasional, konstruk kenegaraan yang kedua menghendaki agar Indonesia didasarkan atas Pancasila, sebuah ideologi yang sudah didekonfessionalisasikan. Kenyataan bahwa diskursus ideologis seperti itu memancing munculnya konflik, hal itu sebagian besar tidak disebabkan oleh tingkat kesalehan keagamaan yang berbeda di kalangan umat Islam, sebuah pandangan yang melandasi konsep-konsep seperti pembilahan santri, abangan, dan Islam sekuler (atau netral agama) yang terkenal itu. melainkan hal itu, terutama disebabkan oleh ketidak mampuan elit politik nasional dalam mendamaikan perbedaan-perbedaan pandangan tersebut di atas, seakan-akan Islam dan nasionalisme merupakan dua entitas yang saling menegasikan.[26]

Ideologi Islamisme, dalam diskursus ini kelompok Islam pada dasarnya menyatakan kembali aspirasi-aspirasi ideologi politik yang sudah mereka kemukakan pada masa pra-kemerdekaan, yakni mendirikan negara yang jelas-jelas berdasarkan Islam. Mereka mengusulkan agar Islam dijadikan menjadi ideologi negara berdasarkan argumen-argumen mengenai watak holistik Islam, keunggulan Islam atas semua ideologi dunia lainnya, dan kenyataan bahwa Islam dipeluk oleh mayoritas warga negara Indonesia.[27]

Islam dengan sifat-sifat khasnya bertujuan menciptakan kesejahteraan umum bagi umat manusia seluruhnya, baik muslim ataupun bukan. Ajaran-ajarannya tentang ibadat dan muamalah, tentang sosial dan ekonomi, tentang pemerintahan dan politik, tentang damai dan perang, semuanya ditetapkan sebagai suatu keharusan agama yang wajib ditaatinya, tanpa ada pilihan menerima atau menolaknya.[28] Islam telah menetapkan hukum-hukumnya dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik sesuai dengan ajaran Kha>lik tentang kesejahteraan umat manusia.[29] Islam membangun perundang-undangan di segala bidang kehidupan manusia, atau dasar menyadari manusia akan eratnya hubungan mereka dengan Kha>lik memberi pengertian kepada mereka akan kebaikan mereka dan mua'amalat dan menyelamatkan mereka dari segala bentuk kejahatan.[30]

Konsepsi negara Islam tanpa agama tidaklah mungkin, seperti tidak mungkinnya agama Islam yang kosong dari cita kemasyarakatan dan politik negara, sebab jika demikian

---

[25] Jarji Zaidan, *Ta>rikh Adab al-Lughah al-'Arabiyah*, jilid I (Kairo: Da>r al-Hilal, 1975), h. 216. Dalam, A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*, ()Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 415.

[26] Bahtiar Effendi, Islam dan Negara: *Transformasi Pemikiran dan Praktik politik Islam di Indonesia*..., h. 60.

[27] Bahtiar Effendi, Islam dan Negara: *Transformasi Pemikiran dan Praktik politik Islam di Indonesia*..., h. 107.

[28] A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 52-53.

[29] A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam*..., h. 53.

[30] A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam*..., h. 54.

DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v14i2.4834

halnya tidak lagi disebut Islam namanya.[31] Perundang-undangan dalam Islam menurut A. Hasjmy dibangun atas dasar moral. Karena itu, negara menurut pandangan Islam adalah negara moral yang berundang-undang dasar tertulis, yakni Alquran.[32] Berdasarkan pemahaman Alquran,[33] Buya Hamka menjelaskan bahwa, Filsafat ajaran, "khalifatullah" inilah yang menumbuhkan keyakinan dalam hati kaum Muslimin, bahwasanya urusan negara dengan agama tidaklah pernah terpisah. Dan urusan kerja usaha jiwa dan badan, rohani dan jasmani tidak tercerai.[34] Menurut Natsir, "negara adalah sebuah institusi yang mempunyai hak, tugas dan tujuan yang khusus". Melalui institusi ini, segala kepentingan yang berkenaan dengan pentadbiran negara disalurkan.[35] Pandangan Natsir, makna berpolitik mengimplikasikan sebahagian daripada makna beragama.[36]

Dipimpin Mohammad Natsir, Kasman Singodimedjo, Zainal Abidin, Isa Anshari, K. H. Masjkur, mereka kokoh mempertahankan watak Islam yang holistik. Mereka percaya bahwa Islam mengatur setiap aspek kehidupan. Mereka dasar negara yang pada dasarnya merupakan organisasi yang meliputi seluruh masyarakat dan lembaga, yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan aturan-aturan yang mengikat, tidak lain kecuali berdasarkan diri pada prinsip-prinsip ilahiah. Berdasarkan pandangan ideologis tersebut, mereka memandang bahwa Pancasila pada dasarnya adalah ideoligi sekuler (*ladiniyah*), tanpa sumber keagamaan yang pasti. Walaupun sila pertamanya mengakui pentingnya kepercayaan kepada satu Tuhan, perumusannya pada dasarnya lebih berdasarkan kepada keharusan sosiologis dan bukan keilahian Tuhan.[37]

2. Ideologi Nasionalis/Sekuler

Mewakili kelompok nasionalis,[38] Soekarno kurang berhasil memberi substansi keagamaan terhadap pandangannya mengenai hubungan Islam dan negara yang telah mengalami "dekonfessionalisasi". Karena itu, meskipun menginfli- kasikan paham kaitan non-formal atau etis antara Islam dan negara, dalam pandangan banyak aktivis Islam Politik, konsepnya sangat dibayang-bayangi oleh semangat "sekularisme" Attaturk, yang disebut dengan nada pejoratif sebagai pemisahan Islam dan negara.[39]

---

[31] A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam*..., h. 53.

[32] A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam*..., h. 54.

[33] Q. S. An-Nu>r/024: 55.

[34] Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, (Djakarta: Widjaya, 1951), h.17

[35] Abdullah Firdaus, Mohd. Nasir Omar, and Idris Zakaria, "Pemikiran Politik Dan Kenegaraan Mohammad Natsir," *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 7, No. 1, (June 2015): 1-10, http://www.ukm.my/ijit/wp-content/uploads/2016/01/IJIT-Vol-7-June-20 15_1_1-10.pdf.

[36] Sri Pajriah, "Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Hubungan Agama Dan Negara Serta Polemiknya Dengan Soekarno," *Jurnal Artefak*, Vol. 4, No. 2, (2017): 167, htt ps://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/910.

[37] Bahtiar Effendi, Islam dan Negara: *Transformasi Pemikiran dan Praktik politik Islam di Indonesia*..., h. 108.

[38] Substansi pemikiran nasionalisme Soekarno terdiri atas humanisme, patriotisme, pembebasan, demokratisasi, pluralisme, dan persatuan. Lihat, Yusni Biliu, "Pemikiran Soekarno Tentang Islamisme Dan Pemahaman Pendidikan Islam", *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari (JIAJ)*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2017): 159-177, https://media.neliti.com/media/pu blication s/291172-pemikiran-soekarno-tentang-islamisme-dan-25872d87.pdf.

[39] Bahtiar Effendi, Islam dan Negara: *Transformasi Pemikiran dan Praktik politik Islam di Indonesia*..., h. 81.

DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v14i2.4834

Pertarungan ideologis antara kelompok Islamis dan kelompok nasionalis baru berlangsung secara penuh dalam pertemuan-pertemuan BPUPKI, yang berlangsung antara akhir Mei hingga pertengahan Agustus 1945. Dialektika yang berlangsung dalam menentukan dasar ideologi negara antara Natsir dan Soekarno, menurut Deliar Noer hanya bersifat ekploratif.[40] Bagi Soerkarno, Pancasila yang ditemukannya sama sekali tidak bertentangan dengan Islam.[41] Fakta bahwa Masyumi tumbuh sebagai kekuatan yang berpengaruh dan dirasakan mendapatkan kemenangan besar dalam pemilu tahun 1955 dipandang sebagai tantangan terhadap Soekarno dan kepresidenannya.[42] Di sisi lain, tanggapan-tanggapan Natsir tidak cukup matang, jawaban-jawabanya terhadap tantangan-tantangan Soekarno kurang berhasil mengartikulasikan secara bermakna watak dan bentuk kaitan politik antara Islam dan negara. Malah Natsir, berhenti pada pernyataan normatif dan umum mengenai Islam yang mungkin mempengaruhi model kaitan antar kedua arus relgiu-politik ini, atau, sebagaimana dinyatakan Deliar Noer, "karena posisinya yang defensif, karya-karya Natsir sebagian besarnya bercorak apologetik".[43]

Memperkokoh gagasan mengenai sebuah negara yang sudah didekonfesionalisasikan, Soekarno mengusulkan "lima prinsip pokok", yang belakangan dikenal sebagai Pancasila, untuk diterima sebagai *philosophische groundslag* (landasan filosofis) negara. Dalam pemahaman Soekarno, pandangan dunia ideologis itu mencakup prinsip-prinsip seperti urutan awalnya, yakni kebangsaan (nasionalisme), internsionalisme, atau peri-kemanusiaan, musyawarah, atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Untuk menjembatani perbedaan di antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis, sebuah panitia kecil kemudian dibentuk. Delapan anggota yang disebut pertama kelompok nasionalis adalah Muslim dengan pandangan politik yang berbeda. Sedangkan empat yang terakhir dari kelompok Islam, sementara A. A. Maramis beragama kristen yang mana pandangan ideologisnya cenderung dengan kelompok nasionalis. Terdiri dari Soekarno, Hatta, Achmad Subardjo, Muhammad Yamin, Abikusno Tjokrosujoso, A. Kahar Muzakkir, Agussalim, A. Wahid Hasjim,[44] dan A. A. Maramis. Panitia kecil menyusun sebuah kesepakatan bersama yang dikenal dengan "Piagam Jakarta". Pada intinya piagam ini mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dengan penambahan bahwa sila ketuhanan dilengkapi dengan "percaya kepada Tuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.[45]

Islam sendiri menghendaki nasionalisme yang bukan untuk menyombongkan diri, jatuh menjatuhkan dan bukan untuk merusak hidup berjamaah dan bermasyarakat.

---

[40] Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*, (Oxford, New York and Jakarta: Oxford University Press, 1978), h. 323. Dalam, Bahtiar Effendi, Islam dan Negara: *Transformasi Pemikiran dan Praktik politik Islam di Indonesia*..., h.81.

[41] Anwar Sanusi, "Sikap Dan Kebijaksanaan Soekarno Terhadap Islam Pasca Kemerdekaan," *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 6, No. 2, (16 Desember 2018), http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/tama ddun/article/view/3520.

[42] Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*..., h. 47-48.

[43] Bahtiar Effendi, Islam dan Negara: *Transformasi Pemikiran dan Praktik politik Islam di Indonesia*..., h. 81-82.

[44] Rijal Mumazziq Zionis, "Relasi Agama Dan Negara Perspektif KH. A. Wahid Hasyim Dan Relevansinya Dengan Kondisi Sekarang," *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 5, No. 2 (October 1, 2015): 333–359. http://jurnalfsh.uinsby.ac .id/index.php/aldaulah/article/view/88.

[45] Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara*: *Transformasi Pemikiran dan Praktik politik Islam di Indonesia*..., h. 88.

DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v14i2.4834

Karakteristik nasionalisme Indonesia di atas, bukan saja di sebabkan oleh posisi Indonesia yang merupakan bagian dari dunia Timur, tetapi lebih dari itu pergerakan-pergerakan militan di Indonesia menurut Soekarno terlahir terutama karena "wahyu" nya pergerakan-pergerakan di Asia secara umum.[46]

Nasionalisme merupakan sikap dan tingkah laku seseorang yang merujuk pada loyalitas dan pengabdian terhadap bangsa dan negara. Nilai nasionalisme merupakan nilainilai yang bersumber pada semangat kebangsaan yang diharapkan dapat menjadi standar perilaku warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Mastrianto nilai-nilai nasionalisme dibagi menjadi empat; yaitu nilai kesatuan, nilai solidaritas, nilai kemandirian, dan nilai rela berkorban.[47]

Pemikiran Soekarno[48] dipengaruhi oleh potensi intelektual, kemampuan berfikir bebas, pengaruh latar belakang sosial budaya, serta perkenalannya dengan dunia luar atau pemikiran orang lain yang digunakan sebagai pembanding. Soekarno juga melakukan pengamatan yang cermat terhadap masyarakat sebelum melahirkan masyarakatnya. Faktor-faktor yang mewarnai pemikiran politik Soekarno adalah nasionalisme,[49] Tradisionalisme Jawa,[50] Sosialis-Demokratis,[51] Islam, dan Komunisme.[52]

Ajaran Soekarno mengenai sosio-nasionalisme dari perjumpaan pemikiran Bung Karno dengan tokoh sosial-demokrasi asal Austria Otto Bauer. Dalam kutipan atas tesis nasionalisme Bauer terkait bahwa bangsa adalah totalitas manusia yang dipertemukan dalam ikatan persamaan nasib menuju persatuan karakter. Dalam uraian tentang persamaan nasib atau riwayat menuju persamaan karakter Soekarno memberikan penjelasan awal terkait tesis tersebut, seperti diuraikan pada karya Soekarno pada tahun 1932 di Fikiran Rakjat berjudul "Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi". Ia menegaskan bahwa nasionalisme kita adalah nasionalisme yang berjejak dalam kehidupan masyarakat. Sosio-nasionalisme adalah nasionalisme yang tidak tumbuh dan hanya berangkat dari perasaan dan sentiment, namun berangkat dari kondisi faktual yang tumbuh di masyarakat. Nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme yang ngelamun, nasionalisme

---

[46] Yusni Biliu, "Pemikiran Soekarno Tentang Islamisme Dan Pemahaman Pendidikan Islam", *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari (JIAJ)*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2017): 159-177, https://media.neliti.com/media/publicatio.

[47] Afandi, dkk, "Nasionalisme di Indonesia", *Nusantara Hasana Journal*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2023), 76-83, https://www.researchgate.net/publication/372100592_NASIONA LISME_DI_INDONESIA.

[48] Guntur Arie Wibowo, "Konsep Nasionalisme Soekarno Dalam PNI 1927-1930," *AGASTYA: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, Vol. 3, No. 02 (July 15, 2013), http:// e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/view/1463.

[49] Dale J. Stahl, "Nations and Nationalism", *Nations and Nationalism*", (2017), https://www.taylorfrancis.com/books/9781912281459.

[50] Joko Tri Haryanto, "Relationship, Transformation and Adaptation of The Traditionalists Against Puritanism in Surakarta Indonesia," *Analisa*, Vol. 22, No. 2 (December 11, 2015): 239, http://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/analisa/artic le/view/207.

[51] Lihat, Heru Nugroho, "Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, (2015), https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/view/23419.

[52] Tsabit Azinar Ahmad, "Sarekat Islam Dan Gerakan Kiri Di Semarang 1917-1920", *SEJARAH DAN BUDAYA*, Vol. 8, No. 2, (Desember 2014): 225-231, http://jour nal.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/article/view/4778.

DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v14i2.4834

melangit maupun nasionalisme mistik, tapi adalah nasionalisme yang berjejak dalam hukum-hukum susunan masyarakat.[53]

Soekarno berhasil merangkai nilai-nilai dasar yang terkandung di berbagai aliran pemikiran yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakatnya, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, kemudian dirangkum dalam suatu pemikiran yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakatnya. Dalam prakteknya, secara tidak langsung Soekarno mengatakan bahwa nasionalisme lebih diutamakan daripada Islam dan Marxisme. Hal ini terbukti dengan didirikannya PNI pada tahun 1927 yang berideologikan nasionalisme sekuler.

3. Ideologi Sosialis-Ekonomi

Perkembangan ideologi sosialis di Indonesia tidak terlepas dari peran Sotan Sjahril, usahanya dalam meraih harapan perjuangan lewat jalur diplomasi mendapat tantangan dari pihak oposisi Tan Malaka.[54] Bangkitnya sosialisme Indonesia menurut Sjahril merupakan hasil dari semangat revolusi bangsa dari pengaruh imperialisme Barat. Maka dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa, revolusi kita sekarang adalah revolusi nasional dan revolusi kerakyatan yang bersangkutan dengan alam feodal di negeri dan masyarakat kita, terutama desa.[55]

Konsep sosialisme yang diinginkan oleh Sjahril adalah sosialisme demokratis. Menurut Sjahril, Ke luar bentuk revolusi berupa nasional, ke dalam menurut hukum masyarakat demokratis dengan corak sosial. [56] Sjahril melihat, kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peran kaum buruh. Di dalam berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, kaum buruh sejalan harus berjuang untuk mendapatkan kedudukannya sendiri yang terkuat, supaya sanggup menjadi pelopor di dalam perjuangan menentang imperialisme di Indonesia ini, dan memperkuatkan perjuangan kaum buruh internasional terhadap kapitalisme dunia.[57]

Perdebatan ideologi Islamis, nasionalis, dan sosialis. Selerai dari pendapat ketiga golongan ini tertuju pada satu persepsi yang sama. Natsir juga menekankan nasionalisme Indonesia haruslah bercorak Islami. Untuk alasan ini, Natsir memperkenalkan gagasan "kebangsaan Islam". Natsir, mendasarkan keyakinannya kepada kenyataan historis bahwa Islamlah yang pada awalnya mendefenisikan nasionalisme Indonesia. Sambil memaparkan asal-usul historis, nasionalisme di Indonesia. Natsir memaparkan, "pergerakan Islamlah (Sarikat Islam) yang dulu membuka jalan medan politik kemerdekaan di tanah air, yang mula-mula menanamkan bibit Persatuan Indonesia, yang menyingkirkan sifat kepulauan dan keprovinsian, yang mula-mula menanam persaudaraan dengan kaum yang sama senasib di luar batas Indonesia dengan tali keislaman".[58]

---

[53] Airlangga Pribadi Kusman, "Politik Sosio-Nasionalisme Sukarno dan Kebangsaan Progresif", *Jurnal Pancasila*, Vol. 3, No. 2, (2022): 65-79, http://jurnal.ugm.ac. id/pancsila/article/view/79636.

[54] Floriberta Aning S., *100 Tokoh yang Mengubah Indonesia: Biografi Singkat Seratus Tokoh Paling Berpengaruh dalam Sejarah Indonesia di Abad 20*, (Tangerang: Gramedia Pustaka, 2005), h. 230.

[55] Soetan Sjahril, *Perjoeangan Kita*, (Pusat Dokumentasi Guntur 49: Anjing Galak, 2010), h. 17-18.

[56] Soetan Sjahril, *Perjoeangan Kita*..., h. 6.

[57] Soetan Sjahril, *Perjoeangan Kita*..., h. 28.

[58] Bahtiar Effendi, Islam dan Negara: *Transformasi Pemikiran dan Praktik politik Islam di Indonesia*..., h. 73.

DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v14i2.4834

Soekarno secara luas mendefenisikan nasionalisme sebagai "cinta kepada tanah air, kesediaan yang tulus untuk membuktikan diri dan mengabdi kepada tanah air, serta kesediaan untuk mengenyampingkan kepentingan golongan yang sempit". Pada kesempatan yang lain Soekarno juga menulis bahwa "nasionalisme adalah keyakinan, kesadaran dikalangan rakyat, bahwa mereka bersatu dalam satu kelompok, satu bangsa".[59] Sementara Sjahril, tidak melihat dari sisi nasionalisme semata, akan tetapi dalam melakukan revolusi harus dipimpin oleh golongan demokratis yang revolusioner, dan bukan oleh golongan nasionalistis, yang pernah membudak kepada fasis-fasis lain. fasis kolonial Belanda atau fasis militer Jepang.[60] Perdebatan tentang ideologi dasar negara berakhir pada tanggal 5 Juli 1959, di Istana merdeka, presiden Soekarno membubarkan Konstituente dan mengumumkan Dekrit Presiden, tentang berlakunya kembali UUD yang digunakan pada awal kemerdekaan 1945, ketika bangsa Indonesia bersepakat mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penutup

Islam dan politik di Indonesia penting dikaji dikarenakan mayoritas penduduknya beragama Islam. Walaupun demikian bukan berarti Islam mendominasi dalam memahami konsep konsep. Beragam budaya tidak menjadikan bangsa Indonesia berkonflik di tataran ide. Nasionalisme kebangsaan jauh lebih utama dibandingkan dengan perbedaan agama, sosial, dan budaya. Heterogen menjadikan Islam termarginal dalam wilayah politik praktis, tetapi nilai-nilai Islam justru mengemuka pada tataran konsep bernegara. Berdasarkan sifat heterogen politik di Indonesia melahirkan wacana politik.

Wacana Islam politik diawal kemerdekaan Indonesia telah menggiring lahirnya tiga varian pemikiran politik; meliputi varian Islamis, nasionalis, dan sosialis-ekonomi. Setiap varian ideologis memiliki konsep tersendiri dan problematis. Perdebatan ini tidak hanya berlangsung di parlemen melainkan juga terjadi di luar lingkup kekuasaan. Konflik pemberontakan di beberapa wilayah di awal kemerdekaan bagian dari pertengkaran ide kelompok islamis dalam melihat konsep dalam bernegara. Berbeda dengan kelompok Islam moderat; memandang Islam politik di Indonesia ditekankan pada nilai substansial, sehingga wacana islamis, nasionalis, dan sosialis-ekonomi mengemuka di tataran elit.

Pertama, varian islamis berupaya menyatakan kembali aspirasi-aspirasi ideologi politik yang sudah mereka kemukakan pada masa pra-kemerdekaan, yakni mendirikan negara yang jelas-jelas berdasarkan Islam. Mereka mengusulkan agar Islam dijadikan menjadi ideologi negara berdasarkan argumen-argumen mengenai watak holistik Islam, keunggulan Islam atas semua ideologi dunia lainnya, dan kenyataan bahwa Islam dipeluk oleh mayoritas warga negara Indonesia. *Kedua*, varian nasionalis lebih terlihat dari peran Soekarno dalam memberi substansi keagamaan terhadap pandangannya mengenai hubungan Islam dan negara yang telah mengalami "dekonfessionalisasi". Karena itu, meskipun menginflikasikan paham kaitan non-formal atau etis antara Islam dan negara, dalam pandangan banyak aktivis Islam politik, konsepnya sangat dibayang-bayangi oleh semangat sekularisme Attaturk, yang disebut dengan nada pejoratif sebagai pemisahan

[59] Anwar Sanusi, "Pemikiran Transformatif Soekarno Dalam Politik Islam (Pende katan Transformatif Bill Gould, Karl Stenbrink, Dan Kontowijoyo)," *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 3, No. 2 (November 1, 2018), http://syekhnur jati.ac.id/jur nal/index.php/empower/article/view/3510.

[60] Soetan Sjahril, *Perjoeangan Kita*..., h. 20.

DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v14i2.4834

Islam dan negara. *Keiga*, varian sosialis-ekonomi. Varian sosialis tidak terlepas dari peran Sotan Sjahril, merupakan hasil dari semangat revolusi bangsa dari pengaruh imperialisme Barat, melahirkan revolusi nasional dan revolusi kerakyatan yang bersangkutan dengan alam feodal. Pada dasarnya sosialisme yang diinginkan Sjahril adalah sosialisme demokratis.

Daftar Pustaka

Assyaukanie, Luthfi, *Ideologi Islam dan Utopia*, (Jakarta: Freedom Institute, 2011)

Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepu lauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Melacak Akar akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung Mizan 1994)

Effendi, Bahtiar, Islam dan Negara: *Transformasi Pemikiran dan Praktik politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998)

Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, (Djakarta: Widjaya, 1951)

Hasjmy, A., *Aset Sejarah Masa Kini dan Masa Depan: Delapan Puluh Tahun Melalui Jalan Raya* Dunia, Penyusun, Badruzzaman Ismail, dkk, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994)

_____, *Di Mana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984)

_____, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*, ()Jakarta: Bulan Bintang, 1990)

S. Floriberta Aning, *100 Tokoh yang Mengubah Indonesia: Biografi Singkat Seratus Tokoh Paling Berpengaruh dalam Sejarah Indonesia di Abad 20*, (Tangerang: Gramedia Pustaka, 2005)

Sjahril, Soetan, *Perjoeangan Kita*, (Pusat Dokumentasi Guntur 49: Anjing Galak, 2010)

Soekarno, *Di Bawah Bendera* Revolusi, (Jakarta: Banana Books, 2016)

Syamsuddin, Din, *Islam dan Politik Era Orde* Baru, (Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 2001)

Zaidan, Jarji, *Ta>rikh Adab al-Lughah al-'Arabiyah*, jilid I (Kairo: Da>r al-Hilal, 1975)

Referensi Jurnal

Afandi, dkk, "Nasionalisme di Indonesia", *Nusantara Hasana Journal*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2023), 76-83, https://www.researchgate.net/publicat ion/372100592_NASIONA LISME_DI_INDONESIA.

Assyaukanie, Luthfi, *Ideologi Islam dan Utopia*, (Jakarta: Freedom Institute, 2011), h. 4. Lihat juga, Mahli Zainudin Tago, "Agama Dan Integrasi Sosial Dalam Pemikiran Clifford Geertz," *KALAM*, Vol. 7, No. 1 (2017): 79-94, http://ejournal.radenintan.ac.id/index. php/ KALAM/article/view/377.

DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v14i2.4834

Ahmad, Tsabit Azinar, "Sarekat Islam Dan Gerakan Kiri Di Semarang 1917-1920", *SEJARAH DAN BUDAYA*, Vol. 8, No. 2, (Desember 2014): 225-231, http://journal.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/article/view/4778.

Biliu, Yusni, "Pemikiran Soekarno Tentang Islamisme Dan Pemahaman Pendidikan Islam", *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari (JIAJ)*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2017): 159-177, https://media.neliti.com/media/publ ication s/291172-pemikiran-soekarno-tentang-islamisme-dan-25872d87.pdf.

Firdaus, Abdullah Mohd. Nasir Omar, and Idris Zakaria, "Pemikiran Politik Dan Kenegaraan Mohammad Natsir," *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 7, No. 1, (June 2015): 1-10, http://www.uk m.my/ijit/wp-content/uploads/2016/01/IJIT-Vol-7-June-20 15_1_1-10.pdf.

Fuad, Fokky, "Islam dan Ideologi Pancasila: Sebuah Dialektika", *Lex* Jurnalica, Vol. 9, No. 3, (Desember 2013): 164-170, https://fh.uai. ac.id/wp-content/uploads/2016/02/Islam-dan-Ideologi-Pancasi la-Sebuah-Dialektika-.pdf2012.

Haryanto, Joko Tri, "Relationship, Transformation and Adaptation of The Traditionalists Against Puritanism in Surakarta Indonesia," *Analisa*, Vol. 22, No. 2 (December 11, 2015): 239, http://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/analisa/article/view/207.

Hasan, Hamsah, "Hubungan Islam Dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia," *Al-Ahkam*, Vol. 1, No. 25 (April 25, 2015): 1 9, http://journal.waliso ngo.ac.id/index.php/ah kam/article/vi ew/192.

Jati, Wasisto Raharjo, "Ulama Dan Pesantren Dalam Dinamika Politik Dan Kultur Nahdlatul Ulama," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* (September 17, 2013), http://ejournal.ui n-malang.ac.id/index.php/ ululalbab/article/view/2377.

Kusman, Airlangga Pribadi, "Politik Sosio-Nasionalisme Sukarno dan Kebangsaan Progresif", *Jurnal Pancasila*, Vol. 3, No. 2, (2022): 65-79, http://jurnal.ugm.ac.id/pancsila/article/view/79636.

Madani, Abubakar, "Dakwah dan Perubahan Sosial: Studi Terhadap Peran Manusia sebagai Khalifah di Muka Bumi", *Lentera*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2017): 1-15, https://journal.iain-samar inda.ac.id/Inde x.php/lentera/article/view/85 1/536.

Maksum, Ali, "Model Pendidikan Toleransi Di Pesantren Modern Dan Salaf," *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, Vol. 3, No. 1 (February 7, 2016): 81, http://jurnalpai.uinsby.ac.id/index.php/jurnalpai/article/view/40.

Muammar, Arief, Amroeni Drajat, and Katimin Katimin, "The Relevance of Ali Hasjmy's Thoughts on Islamic Country of Islamic Sharia Implementation in Aceh," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities*

DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v14i2.4834

and Social Sciences, Vol. 2, No. 2 (May 14, 2019): 228–240, http://bircu-journal.com/index.php/ birci/a rticle/view/255.

Munhanif, Ali, "Al-Shawkah Al-Siyāsīyah Li Al-Afkār Al-Dīnīyah: Al-Ḥarakah Al-Tajdīdīyah Al-Islāmīyah Wa Al-Ṭarīq Ilá Nuqṭat Iltiqā' Al-Islām Wa Al-Dawlah," *Studia Islamika*, Vol. 22, No. 1, (2015): 97-132, http://journal.uinj kt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view /1389.

Muttaqien, Dadan, "Kompromi Politik Antara Nasional Islami Dengan Nasionalis Sekuler Sebuah Solusi Dalam Pemilihan Presiden Di Republik Indonesia," *Al-Mawarid*, Vol. 8 (2002). : 40-51, http://ju rnal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/ view/6127.

Noer, Deliar, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*, (Oxford, New York and Jakarta: Oxford University Press, 1978)

Nugroho, Anjar, "Wacana Islam Dan Negara Era Pra-Kemerdekaan: Pergulatan Ideologis Kelompok Islam Dan Nasionalis Sekuler," Afkaruna, Vol. 9, No. 2 (2013): 129–147, http://journal.umy.ac.id /index.php/afkaruna/article/view/37.

Nugroho, Heru "Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, (2015), https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/view/23419.

Pajriah, Sri, "Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Hubungan Agama Dan Negara Serta Polemiknya Dengan Soekarno," *Jurnal Artefak*, Vol. 4, No. 2, (2017): 167, htt ps://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak /article/view/910.

Purnama, Fahmy Farid, "Khawarijisme: Pergulatan Politik Sektarian Dalam Bingkai Wacana Agama" Al-A'raf: *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. 14, No 2, (Juli-Desember 2016): 214-232, http://ejou rnal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-araf/article/view/156.

Sanusi, Anwar, "Sikap dan Kebijaksanaan Soekarno Terhadap Islam Pasca Kemerdekaan," *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 6, No. 2, (16 Desember 2018), http://sye khnurjati.ac.id/jurnal/index.php/tama ddun/article/view/3520.

_____, "Pemikiran Transformatif Soekarno Dalam Politik Islam (Pende katan Transformatif Bill Gould, Karl Stenbrink, Dan Kontowijoyo)," *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 3, No. 2 (November 1, 2018), http://syekhnur jati.ac.id/ jurnal/index.php/empower/article/view/3510.

Stahl, Dale J., "Nations and Nationalism", *Nations and Nationalism*", (2017), https://www.taylorfrancis.com/books/9781912281459.

DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v14i2.4834

Waryanti, Sri, "Makna Rencong Bagi Ureueng Aceh," *Patanjala : Jurnal Pene litian Sejarah dan Budaya*, Vol. 5, No. 3 (August 4, 2017): 403, http://ejurnalpatanjala. kemd ikbud.go.id/patanjala/index.php/ patanjala/article/view/86.

Wibowo, Guntur Arie, "Konsep Nasionalisme Soekarno Dalam PNI 1927-1930," *AGASTYA: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, Vol. 3, No. 02 (July 15, 2013), http:// e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA /article/view/1463.

Zionis, Rijal Mumazziq, "Relasi Agama Dan Negara Perspektif KH. A. Wahid Hasyim Dan Relevansinya Dengan Kondisi Sekarang," *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 5, No. 2 (October 1, 2015): 333–359. http://jurnalfsh.uinsby.ac .id/index.ph p/aldaulah/article/view/88.

DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v14i2.4834